

LAPORAN HASIL DISKUSI KOMISI VI
PENINGKATAN PENGAWALAN DAN PENGAWASAN PROGRAM KEGIATAN

Ketua Komisi	:	Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Wakil Ketua Komisi	:	Kepala Bapeten
Sekretaris Komisi	:	Rektor IPB
Wakil Sekretaris Komisi	:	Sesitjen Kemenristekdikti
Peserta Rapat Komisi	:	23 Orang (daftar terlampir)
Isu Strategis yang dibahas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Alokasi BOPTN 2. Kebijakan Pengelolaan Beasiswa 3. Kebijakan Kelembagaan Iptek dan Dikti 4. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan 5. Implementasi SPIP

Simpulan Diskusi:

1. Evaluasi kebijakan terhadap alokasi BOPTN perlu dilakukan dengan alasan:
 - a. BOPTN diamanahkan dalam UU No.12 tahun 2012
 - b. BOPTN merupakan program yang sangat strategis dalam menunjang pencapaian tujuan Kemenristekdikti
 - c. BOPTN berpengaruh langsung pada pencapaian targe-target kinerja PTN.
 - d. BOPTN sangat berpengaruh terhadap kebijakan PTN dalam menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - e. Anggaran BOPTN merupakan salah satu anggaran dengan porsi signifikan dalam DIPA Kemenristekdikti.
2. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Beasiswa perlu dilakukan dengan alasan:
 - a. Sangat strategis dalam menunjang pencapaian tujuan Kemenristekdikti
 - b. Beasiswa merupakan program Kemenristekdikti yang menyentuh langsung pelayanan masyarakat.
 - c. Beasiswa merupakan salah satu program prioritas nasional.
 - d. Anggaran Beasiswa merupakan salah satu anggaran dengan porsi yang sangat signifikan dalam DIPA Kemenristekdikti..
3. Evaluasi Kebijakan Kelembagaan Iptek dan Dikti perlu dilakukan dengan alasan:
 - a. Kebijakan kelembagaan merupakan salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - b. Upaya pencapaian tujuan Kemenristekdikti secara keluruhan dapat lebih efektif dan efisien.
 - c. Upaya peningkatan pelayanan Kemenristekdikti kepada masyarakat.
4. Evaluasi Kebijakan Riset dan Pengembangan perlu dilakukan dengan alasan:
 - a. Kegiatan riset dan pengembangan diamanahkan dalam UU No.12 Tahun 2012.
 - b. Riset dan pengembangan merupakan salah satu indikator daya saing bangsa.
 - c. Riset dan pengembangan merupakan salah satu program prioritas nasional
 - d. Diperlukan adanya penyederhanaan dalam sistem pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dan pengembangan.
5. Evaluasi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern perlu dilakukan karena:
 - a. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengendalian internal.
 - b. Kedudukan SPI yang tidak sesuai dengan Statuta PTN
 - c. Pemberian penghargaan kepada SPI yang tidak merata.

6. Peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan program dalam mencapai tujuan Kemenristekdikti sangat strategis karena:
- a. Dirasakan perlunya pihak independen Kementerian yang dapat berperan sebagai konsultan dalam mencari solusi atas adanya kebijakan yang kurang jelas atau bertentangan dalam implementasinya.
 - b. Diperlukan adanya pihak independen yang menilai kinerja implementasi kebijakan.

Ketua Komisi	Sekretaris Komisi
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., MHum	Prof. Herry Suhardiyanto